

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pengklasifikasian daftar informasi publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 939);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi:

- a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan setiap Unit Organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 dan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

TTD

HERMAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 September 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
Inspektorat	1	Perencanaan dan Pelaporan					Inspektur				
		a. Rencana Strategis Inspektorat	√	-	-	Rencana strategis beserta targetnya		Awal RPJMN; LKPP	Softcopy	aktif: 1 tahun setelah tidak berlaku inaktif: 3 tahun status akhir: permanen	1. Keputusan Kepala LKPP Nomor 219 Tahun 2023 Tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip; 2. Peraturan LKPP No.2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Keputusan Inspektur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024.
		b. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat	√	-	-	Rencana Kegiatan Inspektorat selama tahun berjalan		Triwulan I Tahun berjalan; LKPP	Softcopy	aktif: 1 tahun setelah tidak berlaku inaktif: 3 tahun status akhir: musnah	1. Peraturan LKPP No.2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Keputusan Kepala LKPP Nomor 219 Tahun 2023 Tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip.
		c. Laporan Kinerja Tahunan atas sasaran kegiatan pada Inspektorat	√	-	-	Penjelasan Capaian Kinerja Inspektorat		Dibuat setiap tahun; LKPP	Softcopy	3 Tahun aktif, 4 tahun inaktif	1. Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Keputusan Kepala LKPP Nomor 219 Tahun 2023 Tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip; 3. Peraturan LKPP No.2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	2	Piagam Pengawasan Intern	-		√	Kewenangan Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, reviu, pemantauan dan audit		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Softcopy	selama berlaku, 2 tahun inaktif	1. Peraturan LKPP No.2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Keputusan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 130 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	3	Pedoman Pengawasan	-	-	√	Pedoman kegiatan Pengawasan Inspektorat LKPP		Dibuat sesuai kebutuhan dan diperbarui setiap kali ada perubahan; LKPP	Softcopy	Selama berlaku, 3 tahun inaktif	Peraturan LKPP No.2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	4	Paparan atau Materi Pelatihan terkait Pengawasan	-	-	√	Pedoman kegiatan Pengawasan Inspektorat LKPP		Dibuat sesuai kebutuhan dan diperbarui setiap kali ada perubahan; LKPP	Softcopy	Selama berlaku, 3 tahun inaktif	Peraturan LKPP No.2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	5	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang			√	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal		Dibuat setiap tahun; LKPP	Softcopy	1 Tahun aktif, 2 tahun inaktif	1. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ; 2. Peraturan LKPP No.8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan;

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
		ditemukan dalam pengawasan internal									3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4. Peraturan LKPP No.2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Keputusan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 130 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	6	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat			√	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat		Dibuat setiap tahun; LKPP	Softcopy	1 Tahun aktif, 2 tahun inaktif	
Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	1	Petunjuk Penggunaan Aplikasi/Sistem Informasi	-	-	√	Informasi tentang petunjuk penggunaan suatu aplikasi/sistem informasi bagi pengguna diluar pegawai LKPP.	Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Dibuat per aplikasi; LKPP	Softcopy (pdf)	selama berlaku	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan LKPP No.2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	2	Dokumen RFC 2350 LKPP-Computer Security Incident Response Team (CSIRT)	-	-	√	Informasi mengenai kontak LKPPCSIRT, prosedur kontak, dan timLKPP-CSIRT		Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy pada web csirt.lkpp.go.id	selama berlaku	1. Keputusan Kepala LKPP No. 84 Tahun 2021, tentang LKPP Computer Security Incident Response Team. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan LKPP No.2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	3	Laporan Hasil Pengolahan Data dan Informasi	-	-	√	Informasi dari hasil pengolahan data dan informasi untuk pengguna diluar LKPP		Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy (pdf)	selama berlaku	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan LKPP No.2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pusat Pelatihan SDM PBJ	1	Program Pelatihan Pengadaan Barang Jasa	-	-	√	1. Program Pelatihan Kompetensi 2. Program Pelatihan Teknis	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy; website ppsdm.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa
	2	Tata Cara Pelaksanaan Akreditasi LPPBJ	-	-	√	Uraian tentang tata cara pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Softcopy; website ppsdm.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa
	3	Tata cara pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan PBJ	-	-	√	Uraian tentang cara penilaian kesesuaian penyelenggaraan pelatihan PBJ terhadap pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Softcopy, website ppsdm.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa
	4	Tata Cara Penyelenggaraan Pelatihan PBJ	-	-	√	Uraian tentang tata cara penyelenggaraan pelatihan PBJ, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap Perpres No.16 tahun 2018 tentang PBJP.		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Softcopy, website ppsdm.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa
	5	Tata cara pembinaan dalam Penyelenggaraan Pelatihan PBJ	-	-	√	Uraian tentang tata cara penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Softcopy; website ppsdm.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	Keputusan Deputi III Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
	6	Materi Pelatihan	-	-	√	Materi Pelatihan dari Program Pelatihan Fungsional dan Teknis		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Softcopy	Sampai ada pembaruan, 5 tahun inaktif	Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa
	7	Portal Pengembangan dan Pembinaan Sumber daya Manusia pengadaang Barang jasa (PPSDM)	-	-	√	1. Data Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang Jasa (LPPBJ); 2. Data Fasilitator PBJ; 3. Jadwal Pelatihan; 4. Daftar Nama Pengajar yang memiliki Sertifikat Training of Trainer; 5. Data Program Pelatihan; 6. Berita mengenai kegiatan Pusdiklat; 7. e-learning		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Softcopy; website ppsdm.lkpp.go.id	Sampai ada pembaruan, 2 tahun inaktif	PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Perencanaan:					Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan				
		Rencana Strategis LKPP	√	-	-	Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Kinerja dan Anggaran		Awal RPJMN; LKPP	Hardcopy, Softcopy	10 tahun	1. Keputusan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan LKPP; 2. Peraturan LKPP No.10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019; 3. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis LKPP Tahun 2020-2024; 4. Keputusan Sekretaris Utama Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama LKPP Tahun 2020-2024; 5. Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Tahun 2020-2024; 6. Keputusan Deputi II Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Tahun 2020-2024; 7. Keputusan Deputi III Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Tahun 2020-2024; 8. Keputusan Deputi IV Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Tahun 2020-2024; 9. Keputusan Inspektur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat LKPP Tahun 2020-2024; 10. Keputusan Pusdiklat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan LKPP Tahun 2020-2024; 11. Keputusan Kepala LKPP Nomor 176 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama LKPP Tahun 2020-2024
		Rencana Kerja (RENJA) LKPP	√	-	-	Rencana Output dan Anggaran		Bulan Januari-April; LKPP	Hardcopy, Softcopy	5 tahun	1. Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga; 2. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja LKPP Tahun 2021; 3. Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
		Dokumen Ringkasan DIPA LKPP	√	-	-	Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran		Bulan Desember; LKPP	Hardcopy, Softcopy	5 tahun	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
		Laporan Kinerja (LKj) LKPP	√	-	-	Penjelasan Capaian Kinerja LKPP		Bulan April tahun berjalan; LKPP	Softcopy	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	
		Laporan Kinerja (LKj) SESTAMA	√	-	-	Penjelasan Capaian Kinerja Sestama		Februari tahun berjalan; LKPP	Softcopy	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
		Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)	√	-	-	Penjelasan mengenai kontrak kinerja selama satu tahun anggaran		Februari tahun berjalan; LKPP	Softcopy	2 tahun aktif, 3 tahun inaktif	
		Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (Laporan Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran)	√	-	-	Data dan/atau informasi capaian fisik dan keuangan		Bulanan, triwulanan, dan semesteran; LKPP	Softcopy	1 tahun aktif, 1 tahun inaktif	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
		Dokumen Narasi Himpunan RKA K/L LKPP	√	-	-	Dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan berupa Penjelasan mengenai capaian kinerja tahun berjalan dan usulan rencana kinerja/anggaran tahun yang akan datang di LKPP		Bulan Juli tahun berjalan; LKPP	Softcopy	2 tahun aktif, 4 tahun inaktif	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
		Lampiran Pidato Presiden	√	-	-	Penjelasan mengenai bahan dan lampiran pidato presiden ke DPR dan DPD yang berisi strategi dan laporan kinerja LKPP		Bulan Juli tahun berjalan; LKPP	Softcopy	2 tahun aktif, 4 tahun inaktif	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
		Keuangan: Laporan Keuangan Tahunan LKPP (audited)	√	-	-	Terdiri dari: 1. Pernyataan Tanggung Jawab 2. Pernyataan telah direview 3. Laporan Realisasi Anggaran 4. Neraca 5. Laporan Operasional 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan Atas Laporan Keuangan		Semesteran dan tahunan pada tahun anggaran berjalan; LKPP Januari - Mei tahun berikutnya	Hardcopy, Softcopy	2 tahun aktif, 10 tahun inaktif	1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1	Peraturan LKPP	-	-	√	Naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok mengenai kebijakan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi LKPP.	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy pada jdih.lkpp.go.id	Jangka waktu penyimpanan aktif 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku, inaktif 4 Tahun	1. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP beserta perubahannya; 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya; 4. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP; 5. Keputusan Kepala LKPP Nomor 219 Tahun 2023 tentang Pedoman Klarifikasi Arsip, Sistem Klarifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip
	2	Keputusan	-	-	√	Naskah dinas yang memuat: a. pengaturan terkait suatu kebijakan dibidang Pengadaan Barang/Jasa maupun bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit organisasi di LKPP; dan/atau b. kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk Menetapkan/ mengubah status kepegawaian/ personal/ keanggotaan/material/ peristiwa atau menetapkan/ mengubah/ memb ubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan Menetapkan pelimpahan wewenang.					
	3	Instruksi	-	-	√	Instruksi merupakan naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang undangan.				2 Tahun dan permanen/dini lai kembali	

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	4	Surat Edaran	-	-	√	Surat Edaran merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak yang terdiri dari ruang lingkup sebagai berikut: a. berskala Nasional yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau himbauan sebagai tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden; b. berskala internal dan berlaku di LKPP sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Utama; dan c. berskala eksternal untuk memberikan penjelasan atau himbauan sebagai tindak lanjut Peraturan Lembaga atau berdasarkan tugas dan fungsi Kedeputian di LKPP.				Jangka waktu penyimpanan aktif 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku, inaktif 2 Tahun	
	5	Perjanjian Kerjasama	-	-	√	Naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara LKPP dengan Pihak Kedua untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama baik dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP yang bersifat teknis operasional.				Jangka waktu penyimpanan aktif 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku, inaktif 4 Tahun	
	6	Nota Kesepahaman	-	-	√	Naskah dinas kesepakatan/pernyataan antara LKPP dengan Pihak Kedua yang memuat secara prinsip kedua belah pihak sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu baik dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP yang bersifat teknis operasional.		Tahun Berjalan; LKPP		10 tahun dan bisa diperpanjang	Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 234 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	7	Dokumentasi Hukum	-	-	√	Informasi mengenai produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.				Jangka waktu penyimpanan aktif 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	
	8	Standard Operational Procedure (SOP)	-	-	√	SOP di lingkungan LKPP		Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy pada : a. jdih.lkpp.go.id b. rb.lkpp.go.id	10 tahun dan bisa diperpanjang	Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
											Pemerintah Nomor 234 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	9	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi LKPP	-	-	√	Penjelasan mengenai program, kegiatan, hasil yang diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP		2023; Lima tahun sekali, mengikuti periode Renstra; LKPP	Softcopy pada jdih.lkpp.go.id	10 tahun dan bisa diperpanjang	Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 356 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024
	10	Peta Proses Bisnis LKPP	-	-	√	Peta Proses Bisnis level Lembaga, Level 0, Level 1, dan Level 2		2023; LKPP	Softcopy pada jdih.lkpp.go.id	10 tahun dan bisa diperpanjang	Keputusan Kepala LKPP Nomor 336 Tahun 2023 tentang Penetapan Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	11	Standar Pelayanan LKPP	-	-	√	Standar Pelayanan di Lingkungan LKPP		Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy pada jdih.lkpp.go.id	10 tahun dan bisa diperpanjang	1. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 181 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	12	Laporan Survei Kepuasan Pegawai	√	-	-	Penjelasan mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan internal LKPP		Triwulan 4; LKPP	Softcopy	2 tahun aktif, 4 tahun inaktif	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	13	Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di LKPP	-	-	√	Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan LKPP		2019; LKPP	Softcopy pada jdih.lkpp.go.id	10 tahun dan bisa diperpanjang	1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	14	Daftar Nama, jabatan dan pangkat pegawai	-	-	√	Informasi mengenai data pegawai (nama dan jabatan)		Tahun berjalan; LKPP	Hardcopy dan Softcopy	selama masih berlaku, 2 tahun inaktif	1. Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
	13	Rekrutmen Pegawai di Lingkungan LKPP	-	-	√	Informasi mengenai rekrutmen pegawai pada posisi yang lowong di LKPP		2021; LKPP	softcopy pada website www.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 2 tahun inaktif	1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	1	Website dan media sosial LKPP	-	-	√	Informasi mengenai Badan Publik dan Kegiatan Badan Publik	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy pada website lkpp.go.id	2 tahun	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9
	2	Informasi tentang LKPP	-	-	√	Informasi mengenai Profil Badan Publik berisi visi, misi, tupoksi, struktur organisasi dan nama pejabat			Softcopy pada www.lkpp.go.id	2 tahun	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9
	3	Informasi tentang PPID LKPP	-	-	√	Informasi mengenai Profil PPID LKPP berisi visi, misi, tupoksi, struktur organisasi dan maklumat pelayanan			Softcopy pada website ppid.lkpp.go.id	2 tahun	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22
	4	Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di LKPP			√	Informasi mengenai Prosedur Pelayanan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Pengajuan Sengketa Informasi Publik di LKPP			Softcopy pada ppid.lkpp.go.id	2 tahun	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22
	5	Daftar informasi publik yang dikuasai LKPP	-	-	√	Informasi mengenai daftar informasi publik yang dikuasai Unit Kerja Eselon 2 di LKPP		Tahun Berjalan; LKPP Triwulan 4; LKPP Triwulan 4; LKPP	Hardcopy dan Softcopy	2 tahun	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 11
	6	Produk hukum PPID LKPP	-	-	√	Informasi mengenai produk Hukum yang dikeluarkan oleh PPID LKPP			Softcopy pada website ppid.lkpp.go.id	2 tahun	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9
	7	Pelaksanaan kegiatan LKPP	√	-	-	Informasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Publik yang sudah fix dilaksanakan			Hardcopy dan Softcopy	2 tahun	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	8	Publikasi kegiatan LKPP	-	-	√	Informasi mengenai bahan-bahan publikasi seperti Majalah, dan Jurnal Pengadaan			Hardcopy dan Softcopy	2 tahun	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9
	9	Laporan PPID	√	-	-	Laporan mengenai jumlah permohonan layanan informasi publik			Hardcopy dan Softcopy	2 tahun	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9
	10	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	√	-	-	Data dan/atau informasi terkait dengan tingkat kepuasan pengguna layanan publik LKPP			Softcopy	2 tahun aktif, 4 tahun inaktif	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	11	Data Koleksi perpustakaan LKPP	-	-	√	Jumlah koleksi dan Deskripsi data koleksi perpustakaan yang terdiri dari judul, nama pengarang, tahun dan kota terbit.		Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy pada perpustakaan.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	
	12	Daftar Hibah Buku perpustakaan LKPP	-	-	√	Daftar Koleksi Buku yang dihibahkan dari anggota perpustakaan		Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy berupa format manual yang dibuat oleh Pustakawan.	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	
	13	Laporan Barang Milik Negara Tahunan LKPP (audited)	√	-	-	Terdiri dari: 1. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara 2. Laporan Posisi BMN di Neraca 3. Laporan Barang Persediaan 4. Laporan BMN Intrakomptabel 5. Laporan BMN Ekstrakomptabel 6. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel 7. Laporan BMN Barang Bersejarah 8. Laporan BMN Aset Tak berwujud 9. Laporan BMN Konstruksi Dalam Pengerjaan 10. Laporan BMN BPYBDS (Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya) 11. Laporan Penyusutan Intrakomptabel 12. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel 13. Laporan Penyusutan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel 14. Laporan Kondisi Barang 15. Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak		Semesteran dan Tahunan pada tahun berjalan; LKPP	Hardcopy dan Softcopy	2 tahun aktif, 10 tahun inaktif	1. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; 2. PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.
	14	Daftar Arsip Inaktif LKPP	√	-	-	informasi mengenai rincian arsip inaktif yang disimpan		Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy	Selama Masih berlaku	1. Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan; 2. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan LKPP No 11 tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di LKPP.
	15	SOP Persuratan di LKPP	√	-	-	Terdiri dari: 1. Penaanganan Surat Masuk 2. Surat masuk satu pintu		Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy	Selama Masih berlaku	1. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; 2. PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN; 3. Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	16	SOP Kearsipan di LKPP	√	-	-	Terdiri dari: 1. Penyimpanan Arsip Inaktif 2. Peminjaman Arsip Inaktif 3. Pengembalian Arsip Inaktif		Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy	Selama Masih berlaku	1. Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Peraturan LKPP No 11 tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di LKPP Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
						4. Perpanjangan Peminjaman arsip inaktif Pendataan perlindungan dan penyimpanan arsip vital 5. Alih Media 6. Monitoring kearsipan 7. Pemindahan Arsip 8. Pemusnahan Arsip 9. Penyerahan Arsip 10. Pemeliharaan Kebersihan Tempat Arsip 11. Pemberkasan Arsip Aktif 12. Peminjaman Arsip Aktif 13. Pengembalian Arsip Aktif 14. Pendataan perlindungan dan penyimpanan arsip vital					
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	1	Ringkasan Kajian pendukung peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	-	-	√	Informasi yang menggambarkan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian di bidang pbjp	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Setiap kali ada penyusunan; LKPP	Hardcopy dan Softcopy	1 tahun setelah tidak berlaku (aktif), 3 tahun (inaktif)	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	2	Daftar Inventaris Masalah (DIM) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	-	-	√	Informasi yang menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah		Setiap kali ada penyusunan; LKPP	Softcopy	Selama peraturan perundang-undangan tersebut berlaku, 3 tahun (inaktif)	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	3	Informasi hasil Diseminasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	-	-	√	Informasi berkaitan dengan pelaksanaan diseminasi Pengadaan Barang/Jasa yang sudah dilaksanakan		Tahunan; LKPP	Softcopy	Selama berlaku	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	4	Informasi pada situs SIPRAJA	-	-	√	Informasi berkaitan kumpulan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, tanya jawab, dan materi diseminasi yang dipublikasikan pada situs SIPRAJA		Setiap kali publikasi; LKPP	Website	Selama berlaku	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	1	Aplikasi TEMANKU	-	-	√	Sistem Layanan Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus, meliputi: 1. KPBU 2. BLU/BLUD 3. Desa 4. BUMN/BUMD 5. Badan Hukum Publik	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Tahun Berjalan	Website	selama berlaku	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	2	Model Dokumen Swakelola di Desa	-	-	√	Model Dokumen Swakelola Barang/Jasa di Desa sebagai acuan bagi perangkat desa dalam melaksanakan proses pbj di desa yang berupa model perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan		2024; LKPP	Softcopy	1 tahun aktif, 5 tahun inaktif	1. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PerLKPP 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
	3	Buku Pintar dan Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa	-	-	√	1. Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa di Desa edisi Desember 2019 memuat contoh-contoh dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa 2. Buku Pedoman yang berisi peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.		2019 dan 2021; LKPP	Hardcopy dan Softcopy	1 tahun aktif, 5 tahun inaktif	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	4	Kajian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	-	-	√	Hasil kajian manajemen kontrak KPBU mengenai perbandingan pelaksanaan manajemen kontrak menurut beberapa pedoman dari beberapa negara di dunia dengan peraturan yang ada di Indonesia saat ini		2020; LKPP Tahun berjalan	Softcopy	1 tahun aktif, 5 tahun inaktif	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	5	Dokumen Pengadaan KPBU	-	-	√	1. Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk Sektor Alat Penerangan Jalan 2. Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk Sektor Generik		20202; LKPP Tahun berjalan	Softcopy	1 tahun aktif, 5 tahun inaktif	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	6	Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Proyek Di Ibu Kota Nusantara	-	-	√	Model dokumen ini menjadi panduan bagi PJPk,Panitia KPBU IKN dan Badan Usaha dalam menyusun dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di IKN. Model Dokumen ini berisi: 1. Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di IKN diprakarsai oleh Badan Usaha (Unsolicited) 2. Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Panel Badan Usaha dalam Rangka Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di IKN		2023; LKPP Tahun berjalan	Softcopy	1 tahun aktif, 5 tahun inaktif	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	7	Surat Edaran Bersama Kepala LKPP dan Menteri Dalam Negeri RI tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah dan Pedoman Penyusunan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia	-	-	√	SEB ini menjadi contoh Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah dan Pedoman Penyusunan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia		2023; LKPP Tahun berjalan	Hardcopy dan Softcopy	1 tahun aktif, 5 tahun inaktif	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	8	Kajian Badan layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD)	-	-	√	Kajian Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah merupakan pedoman untuk menyusun model kajian Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD. Didalamnya memuat hal-hal yang diatur pada Peraturan Pemimpin BLU/BLUD tentang PBJ seperti profil pelaku PBJ BLU/BLUD, tahapan pengadaan sesuai dengan proses bisnis pada BLU/BLUD, kriteria dan kondisi keadaan khusus, metode lainnya di luar PBJ dan cara menentukan jenjang nilai PBJ pada BLU/BLUD.		2024; LKPP Tahun berjalan	Hardcopy dan Softcopy	1 tahun aktif, 5 tahun inaktif	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	9	Model Dokumen Pengadaan Penyedia di Desa	-	-	√	Berisikan format-format dokumen pengadaan barang/jasa di Desa yang dibutuhkan oleh para pelaku pengadaan barang/jasa di Desa. Contoh dokumen dimulai sejak tahap Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, hingga Pelaporan dan Serah Terima		2024; LKPP Tahun berjalan	Hardcopy dan Softcopy	1 tahun aktif, 5 tahun inaktif	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	1	Kajian Iklim Usaha di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	-	-	√	Kajian pengembangan iklim usaha nasional dalam perluasan kesempatan usaha di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di Bidang Konstruksi	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2015; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Sustainable Public Procurement Strategi membangun Awareness Sustainable Public procurement (SPP) bagi Pemerintah dan Skema Insentif Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam produksi Barang/Jasa yang Berkelanjutan		2015; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Pengembangan Iklim Usaha Sektor Kapal tangkap Skala Kecil Dalam perluasan Kesempatan Usaha dibidang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah		2016; LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Pengembangan Iklim Usaha Benih Padi Dalam perluasan Kesempatan Usaha di bidang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah		2016; LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Evaluasi Implikasi Kebijakan PBJP terhadap Kinerja Sektor Konstruksi dan Value for Money dalam Penyediaan Infrastruktur Publik		2016; LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			√	-	-	Laporan Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Bulan Desember tahun berjalan; LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Peta Jalan Pengembangan Sustainable Public Procurement di Indonesia		2017; LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			√	-	-	Laporan Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Bulan Desember tahun berjalan; LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan Sustainable Public Procurement (SPP)		2018; LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Laporan Kegiatan Kesiapan Penyedia Barang/Jasa dan Dampak Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement) Terhadap Penyediaan Barang/Jasa Yang Memenuhi Aspek Berkelanjutan		2018; LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan Konsolidasi Pengadaan Terhadap Iklim Usaha UMKM dalam PBJP	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan	2018; LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
			-	-	√	Laporan Akhir Kajian Pemetaan Komoditas Barang dari Penyedia Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kerjasama Internasional	2018; LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Laporan Kajian Sentralisasi Pengadaan untuk Pengadaan yang Bersifat Kompleks, Besar dan Strategis		2019; LKPP	Hardcopy, softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2019; LKPP	Hardcopy, softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Fasilitasi 3 (Tiga) Produk Hijau atau Hasil Industri Hijau untuk Digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2019; LKPP	Hardcopy, softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pengembangan Kapasitas UMKM yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2020; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
					√	Kajian Penggunaan Kriteria Lingkungan, Sosial dan Ekonomi pada Pengadaan Berkelanjutan dalam Kaitannya dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2020; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
					√	Kajian Pemetaan Stakeholder Engagement untuk Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2021; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Pemetaan Persepsi Pelaku Pengadaan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan		2021; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	2	Kajian Persiapan Negosiasi Kerjasama Perdagangan Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah	-	-	√	Laporan Pelaksanaan Piloting Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang Berkelanjutan untuk Fitur Kayu yang Memenuhi SVLK		2022; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Posisi Indonesia dalam kerjasama Perdagangan Internasional		2015; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Kesiapan Penyedia Dalam Negeri dalam kerangka Kerjasama Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2017; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Dampak Pembukaan Akses Pasar PBJP dalam GPA WTO, IEU CEPA dan IJEPA Terhadap Regulasi Dalam Negeri		2018; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Kesiapan Penyedia Barang/Jasa Indonesia dalam Kerjasama Bilateral Perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA)		2018; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Dampak Ekonomi Liberalisasi PBJP dalam Kerangka IEU-CEPA Terhadap Industri Domestik		2018; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Daya Saing dan Dampak Ekonomi dalam Kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)		2019; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
			-	-	√	Kajian Pemetaan Procurement Guidelines Donor dalam rangka Kegiatan Kajian Kerjasama Ekonomi Internasional		2020; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	3	Buku Saku Pelaku Usaha			√	Buku Panduan bagi Pelaku usaha untuk mendaftar di website UNGM		2023; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	4	Aplikasi			√	Buku Panduan bagi Pelaku usaha untuk mendaftar di website IsDB		2024; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		Aplikasi Business Information and Supplier platform (BISA) Pengadaan			√	Buku Panduan bagi Pelaku usaha untuk mendaftar di website WB		2024; LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	1	Buku Profil Pengadaan Nasional	√	-	-	Berisi data dan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen pengawasan mulai dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, sampai dengan pelaksanaan kontrak oleh masyarakat luas di semua kalangan termasuk bagi para pelaku pengadaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga audit, atau aparat penegak hukum (Ringkasan isi informasi menunggu konfirmasi lebih lanjut)	Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	Tahun berjalan; LKPP	https://inaproc.id/berita/Berita/Penyampaian-Laporan-Kinerja-Pelaksanaan-Pengadaan-dan-Buku-Profil-Pengadaan	selama berlaku	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah; 3. Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja LKPP; 4. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengadaan; 5. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha PBJP.
	2	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)	-	-	√	Sistem informasi untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilaksanakan oleh K/L/Pemda		Tahun berjalan; LKPP	Aplikasi: sirup.lkpp.go.id	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	
	3	Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL)	-	-	√	Sistem Informasi yang menampilkan rekapitulasi tahapan pengadaan barang/jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pemilihan, kontrak dan serah terima hingga pembayaran		Tahun berjalan; LKPP	Aplikasi pada setiap LPSE di masing2 K/L/Pemda. Misal: lpse.lkpp.go.id/eproc4/amel/	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	4	Flipbook Laporan Kinerja Pengadaan Nasional	√	-	-	Sistem Informasi yang menampilkan Rapor Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional maupun masing-masing Keseluruhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah		Tahun berjalan; LKPP	<u>Aplikasi:</u> monev.lkpp.go.id/flipbook/kl & monev.lkpp.go.id/flipbook/kpd	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	
	5	LKPP Bigbox	-	-	√	Dashboard Monitoring Perencanaan dan Realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.		Tahun berjalan; LKPP	https://data-pdn.inaproc.id/public/page/id/860	selama berlaku	
Direktorat Sistem Pengadaan Digital	1	Informasi mengenai sebaran LPSE di seluruh Indonesia	-	-	√	Sistem informasi yang memuat identitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Indonesia.	Direktur Sistem Pengadaan Digital	Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Website https://eproc.lkpp.go.id/lpse/	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	PerLKPP No. 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
	2	Informasi mengenai petunjuk penggunaan Aplikasi SPSE	-	-	√	Sistem informasi yang memuat tata cara penggunaan SPSE sebagai Admin PPE, Admin Agency, PPK, Kepala Unit Pengelola PBJ, Pokja Pemilihan, PP, Penyedia, Verifikator, Helpdesk, dan Auditor.		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	https://inaproc.id/unduh?q=Petunjuk%20Penggunaan	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	PerLKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
	3	Informasi mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-	-	√	Berisi informasi dan Changelog Aplikasi		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	https://inaproc.id/aplikasi	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	1. PerLKPP No. 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 2. PerLKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
	4	Data Pengadaan Nasional	-	-	√	Portal Pengadaan Nasional yang digunakan untuk menayangkan: - Data Tender; - Produk di e-Katalog; - Informasi Rencana Umum Pengadaan; - Sebaran LPSE; - Daftar Hitam; - Daftar Unduhan; - Satu Data eProc; - Berita; - Daftar Aplikasi; dan - Daftar Tautan.		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Website http://inaproc.id/	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
	5	Sosial Media Direktorat Sistem Pengadaan Digital	-	-	√	Sosial media yang dikelola Direktorat Sistem Pengadaan Digital		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	- Youtube: https://www.youtube.com/user/eprocLKPP - Instagram: https://www.instagram.com/eproc.lkpp/ - Twitter: https://twitter.com/eproc_lkpp "	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PerLKPP No. 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	6	Portal eProc	-	-	√	Portal LPSE yang digunakan untuk menayangkan: - Agenda Kegiatan; - Sebaran LPSE - Lacak Tiket; - Daftar Unduhan;		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Website https://eproc.lkpp.go.id/	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. PerLKPP No. 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
						- Daftar Panduan; dan - Daftar Berita.					
	7	SIKaP	-	-	✓	sistem informasi mengenai data kualifikasi pelaku usaha dan kinerja penyedia barang/jasa pemerintah		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	website: https://sikap.lkpp.go.id/	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	
	7	SIKaP	-	-	✓	sistem informasi mengenai data kualifikasi pelaku usaha dan kinerja penyedia barang/jasa pemerintah		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	website: https://sikap.lkpp.go.id/	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	
Direktorat Pasar Digital Pengadaan d.h. Pengembangan Sistem Katalog	1	Informasi mengenai petunjuk penggunaan E-purchasing dan Katalog Elektronik	-	-	√	Informasi mengenai petunjuk penggunaan <i>E-purchasing</i> dan Katalog Elektronik bagi Pengguna Katalog	Direktorat Pasar Digital Pengadaan d.h. Pengembangan Sistem Katalog	Tahun berjalan; LKPP	<i>Softcopy</i> / website e-katalog.lkpp.go.id atau bantuan.inaproc.id	Selama masih berlaku	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2022
	2	Informasi mengenai perkembangan jumlah produk, jumlah penyedia dan transaksi E-purchasing Katalog Elektronik	-	-	√	Informasi mengenai perkembangan jumlah produk, jumlah penyedia dan transaksi E-purchasing Katalog Elektronik yang ditampilkan dalam bentuk dashboard			<i>Softcopy</i> / tautan https://s.id/MonevKatalog		
	3	Informasi mengenai Konten Katalog Elektronik	-	-	√	Berupa nama produk, nama penyedia, merek/tipe dan spesifikasi harga barang/jasa yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik	- Masing-masing Penyedia - Direktorat Pasar Digital Pengadaan	Tahun berjalan; lokasi masing-masing penyedia dan LKPP	Konten Penayangan Aplikasi e-katalog.lkpp.go.id atau katalog.inaproc.id		
	4	Informasi terkait Pengumuman Pencatuman Produk pada Etalase di Katalog Elektronik	-	-	√	Informasi terkait persyaratan pencantuman produk pada masing-masing Kategori Produk yang tersedia pada Katalog Elektronik (Dokumen Telaahan Kategori Produk)	- Direktorat Pasar Digital Pengadaan - Kementerian/Lembaga Pengelola Sektoral	Tahun berjalan; lokasi masing-masing pengelola Katalog Elektronik	<i>Softcopy</i> / website e-katalog.lkpp.go.id atau katalog.inaproc.id		
	5	Informasi mengenai Kategori Produk yang tersedia pada Katalog Elektronik	-	-	√	Informasi mengenai Etalase-Kategori Produk yang tersedia pada Katalog Elektronik			website e-katalog.lkpp.go.id atau katalog.inaproc.id		
	6	Kumpulan Tanya Jawab terkait Katalog Elektronik	-	-	√	Berisi kumpulan pertanyaan dan jawaban terkait permasalahan yang mungkin dialami ketika menggunakan Katalog Elektronik	Direktorat Pasar Digital Pengadaan d.h. Pengembangan Sistem Katalog	Tahun berjalan; LKPP	website e-katalog.lkpp.go.id atau bantuan.inaproc.id		
	7	Kumpulan Berita terkait Katalog Elektronik	-	-	√	Informasi terkait berita yang ditayangkan di menu Berita Katalog Elektronik (dapat berupa dan tidak terbatas pada berita promosi produk, pengadaan konsolidasi nasional dan pemberitahuan pemeliharaan sistem)	Direktorat Pasar Digital Pengadaan d.h. Pengembangan Sistem Katalog	Tahun berjalan; LKPP	website e-katalog.lkpp.go.id atau katalog.inaproc.id		
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	1	Profil Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	√	-	-	Informasi yang memuat mengenai profil dan tugas fungsi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	LKPP	Website LKPP (lkpp.go.id) dan Portal PPSDM LKPP (ppsdm.lkpp.go.id)		1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 Tentang LKPP beserta perubahannya; 2. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	2	Program dan Layanan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	√	-	-	Informasi yang memuat mengenai program dan layanan yang ada di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan		LKPP	Website Portal PPSDM LKPP (ppsdm.lkpp.go.id)		1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 Tentang LKPP beserta perubahannya;

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
											2. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	3	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, PermenpanRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang SKJ JFPPBJ	-	-	√	Standar Kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang telah diterbitkan pada PermenpanRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang SKJ JFPPBJ		Penyusunan dilakukan pada tahun 2018-2019; LKPP	Softcopy	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
	4	Informasi mengenai sebaran status, dan jumlah UKPBJ di seluruh Indonesia	-	-	√	Uraian tentang sebaran, status & jumlah keberadaan UKPBJ di seluruh Indonesia		tahun berjalan; LKPP	Softcopy/ website siukpbj.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barng/Jasa
	5	Informasi Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ dan Penggunaan Aplikasi SIMKU (siukpbj.lkpp.go.id)	-	-	√	Hasil kajian LKPP yang berisi tentang cara pengukuran kematangan UKPBJ di K/L/Pemda		tahun berjalan; LKPP	Softcopy/ website siukpbj.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barng/Jasa 3. Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2019 tentang Model Kematangan UKPBJ
	6	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			√	Pedoman yang memuat mengenai tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi JF PPBJ di KLPemda		2016; LKPP	Softcopy	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
	7	Sistem Informasi Perpindahan Dari Jabatan Lain	-	-	√	Aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran dan uji kompetensi pengangkatan dalam JF PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain		2021; LKPP	perpindahan.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nmor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola PBJ; 3. Keputusan Deputi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain.
	8	Sistem Informasi Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ (SIRENAKSI PPBJ)	-	-	√	Aplikasi yang digunakan untuk menyusun rencana aksi dan melaporkan pemenuhan bukti dukung dalam rangka melaksanakan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ		2021; LKPP	sirenaksi.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola PBJ; 3. Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pegadaan Barang/Jasa; 4. Keputusan Deputi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panduan Penggunaan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
	9	Keterisian JF PPBJ di KLPemda				Informasi yang memuat mengenai tingkat keterisian JF PPBJ di KLPemda		2020; LKPP	Portal PPSDM LKPP (ppsdm.lkpp.go.id)	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola PBJ; 3. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator "Antara" Dalam Indeks Reformasi Birokrasi
	10	Dokumen Analisa Jabatan JF PPBJ	-	-	√	Informasi yang memuat mengenai uraian masing-masing jenjang jabatan JF PPBJ yang meliputi tugas, hasil kerja, dan persyaratan jabatan		2020; LKPP	Softcopy	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. PermenPANRB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; 4. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
	11	Dokumen Informasi Faktor Jabatan JF PPBJ	-	-	√	Informasi yang memuat mengenai penjelasan atas 9 informasi faktor jabatan dalam rangka menentukan kelas jabatan (job grading) setiap jenjang JF PPBJ		2020; LKPP	Softcopy	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. PermenPANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 3. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
Direktorat Sertifikasi Profesi	1	Jadwal Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	-	√	Berisi informasi jadwal penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilaksanakan LKPP maupun permintaan Instansi	Direktur Sertifikasi Profesi	Berubah setiap ada perubahan; website ppsdm.lkpp.go.id	Softcopy	di Website: 2 Tahun setelah penyelenggara an, 3 tahun inaktif	1. Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan peraturan turunannya; 2. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
	2	Daftar Peserta Lulus Uji Kompetensi	-	-	√	Berisi informasi terkait kelulusan Peserta Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Berubah setiap ada perubahan; website ppsdm.lkpp.go.id	Softcopy	di Website: 2 Tahun setelah penyelenggara an, 3 tahun inaktif	
	3	Daftar Pemilik Sertifikat Dasar /Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	-	√	Berisi informasi terkait kepemilikan Sertifikat Dasar/ Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Berubah setiap ada perubahan; website sertifikasipbj.lkpp.go.id	Softcopy	selama berlaku	
	4	Daftar Pemilik Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	-	√	Berisi informasi terkait kepemilikan Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Berubah setiap ada perubahan; Google Drive	Softcopy	selama berlaku	
	5	Data/Status Pengiriman Sertifikat Kompetensi	-	-	√	Berisi informasi terkait pengiriman Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Berubah setiap ada perubahan; website ppsdm.lkpp.go.id	Softcopy	di Website: 2 Tahun setelah penyelenggara an, 3 tahun inaktif	
	6	Kontak Direktorat Sertifikasi	-	-	√	Berisi informasi terkait data alamat dan layanan konsultasi Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Berubah setiap ada perubahan; website ppsdm.lkpp.go.id	Softcopy	selama berlaku	
	7	Skema Kompetensi	-	-	√	Berisi informasi terkait paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.		Berubah setiap ada perubahan; website ppsdm.lkpp.go.id	Softcopy	2 Tahun setelah diperbarui, 1 Tahun inaktif	
Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	1	Informasi mengenai pemberian Advokasi,Probity Advice dan clearing House	-	-	√	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Pusat Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang meliputi: 1. Jadwal Pelaksanaan 2. Mekanisme Penyelenggaraan 3. Kuota Peserta 4.Sumber Pembiayaan	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	Tahun berjalan; LKPP	Softcopy yang dapat diunduh www.lkpp.go.id, sertifikasi.lkpp.go.id	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	2	Informasi mengenai Procurement Knowledge Management System	-	-	√	Informasi seputar pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah		Tahun berjalan; LKPP	infografis, video, materi paparan dan tanya jawab pada website pkms.lkpp.go.id dan https://kepo-pbj.lkpp.go.id/p/home	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	1. Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan peraturan turunannya; 2. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	1	Informasi mengenai Probity Advice dan Clearing House	-	-	√	Informasi terkait Layanan untuk Pemerintah Daerah	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	Tahun berjalan; LKPP	Informasi mengenai Probity Advice dan Clearing Housdalam Aplikasi: https://sertifikasipbj.lkp p.go.i d/	Selama berlaku; 3 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan turunannya; 2. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Probity Advice Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4. Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Clearing House.

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	1	Informasi Bimbingan teknis, Seminar dan Loka Karya	√	-	-	Informasi berkaitan dengan laporan kegiatan Bimbingan teknis, Seminar dan Loka Karya yang dilaksanakan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	1. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan di LKPP
	2	Informasi Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli	√	-	-	Informasi berkaitan dengan laporan kegiatan peningkatan kapasitas pemberi keterangan ahli yang dilaksanakan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum		Tahun Berjalan; LKPP	softcopy	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	
	3	Statistik Hasil Seleksi Keterangan Ahli	√	-	-	Rekapitulasi jumlah pemberi keterangan Ahli yang memenuhi kriteria		Tahun Berjalan; LKPP	softcopy	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	
	4	Statistik Rekomendasi Surat	√	-	-	Informasi berkaitan dengan jumlah rekomendasi surat yang diberikan oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum		Tahun Berjalan; LKPP	softcopy	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	1. Peraturan LKPP Nomor 23 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan di LKPP
	5	Statistik Data Konsultasi	-	-	√	Informasi berisi statistik kategori pertanyaan dan profil pihak yang mengajukan pertanyaan		Tahun Berjalan; LKPP	softcopy	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	
	6	Statistik Pemberian Keterangan Ahli	√	-	-	Rekapitulasi jumlah pemberian layanan keterangan ahli		Tahun Berjalan; LKPP	softcopy	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	
	7	Statistik Pengaduan yang diajukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Peran gkat Daerah di portal epengaduan	-	-	√	Rekapitulasi jumlah Pengaduan dari masyarakat/penyedia barang/jasa atas pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah		Tahun Berjalan; LKPP	softcopy	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	
	8	Permohonan terhadap layanan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di portal Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	-	-	√	Permohonan atas layanan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah		Tahun Berjalan; LKPP	softcopy	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

TTD

HERMAWAN